

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN RESIMEN MAHASISWA DALAM BIDANG PERTAHANAN NEGARA**

Pertahanan negara merupakan amanat konstitusi Republik Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 dikemukakan sejumlah tujuan negara, yang salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) yang terbagi menjadi tiga unsur yaitu komponen utama (TNI), komponen cadangan (warga negara) serta sarana dan prasarana nasional. Salah satu unsur dari komponen cadangan tersebut adalah Resimen Mahasiswa (Menwa) yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pembahasan dalam artikel ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach*. Pertama, skripsi ini akan membahas bagaimana fungsi pemerintah dalam pertahanan negara, dimana tujuan negara Indonesia salah satunya adalah membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, akan dijabarkan bagaimana konsep dan komponen pertahanan Negara Republik Indonesia. Ketiga, posisi Menwa sebagai salah satu unsur pertahanan dan komponen pendukung dalam pertahanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai salah satu komponen pertahanan negara yang termasuk dalam kategori rakyat terlatih, Menwa senantiasa melakukan pembinaan terhadap anggotanya melalui pola pendidikan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari pengertian, tugas dan fungsi pokok menwa merupakan salah satu bagian dari komponen mobilisasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi. Dapat dikemukakan bahwa kedudukan Menwa sebagai kekuatan sipil pertahanan negara menempatkan posisinya sebagai Komponen Pendukung dalam Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia, sehingga seorang anggota Menwa mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan baik sebagai perseorangan maupun sebagai organisasi. Patut menjadi perhatian adalah belum adanya payung hukum yang mengatur bagaimana Menwa menjalankan tugasnya tersebut. Menwa harus mempunyai dasar hukum minimal Peraturan Pemerintah seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dijelaskan bahwa tentang komponen cadangan dan pendukung dilaksanakan melalui undang-undang.

**Kata Kunci : Pertahanan Negara, Komponen Pertahanan Negara, Mobilisasi, Resimen Mahasiswa**

## **JURIDICIAL REVIEW TO POSITION OF UNIVERSITY STUDENT REGIMENT (RESIMEN MAHASISWA) ON THE NATIONAL DEFENCE**

National defense is a mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia. In the fourth paragraph opening of UUD 45 put forward a number of destination countries, one of which is "to protect the people and the state of Indonesia". Meanwhile, Indonesia's defense function organized by the Defense System of the Universe (Sishanta) which is divided into three components, the main component (TNI), the reserve component (civilian) and the national infrastructure. One of the components of these reserves is Resimen Mahasiswa (Menwa) which is the realization of implementation *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002* about the National Defense.

The discussion in this paper is a normative legal research with *conceptual approach* and *statute approach*. First, this paper will discuss how the government functions in the defense of state, where the destination state of Indonesia one of which is forming a government of Indonesia that protect the entire Indonesian nation and the entire country of Indonesia. Second, will be outlined how the concepts and components of the defense of the Republic of Indonesia. Third, the Menwa position as one of the elements of defense and support components in the defense of the Republic of Indonesia.

As one component of national defense included in the category of trained people, Menwa continues to provide guidance to its members through continuing education patterns. Viewed from the definition, assignment and basic function Menwa is one part of the mobilization component is meant by *Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997* about the mobilization. It can be argued that the position of the civil defense force, Menwa as the state puts its position as the Component Support Component of Defence of the Republic of Indonesia so that a member of the Menwa have rights and obligations that have been determined both as individuals and as an organization. But that should be of concern is the absence of

legal framework that governs how the Menwa duties. Menwa must have a legal basis minimal government regulation as it has been mandated in *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002* explained that about supporting component implemented through legislation.

**Key Word : National Defense, Reserve National Defense Elements, Mobilization, Student Regiment**

